

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat UUD RI Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No.32 dan No. 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Adapun yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah adalah dikarenakan tidak

meratanya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Peningkatan nilai DAU akan meningkatkan belanja modal yang dibelanjakan. Meningkatnya belanja modal dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari PAD yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil pengembalian kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk di kembangkan menjadi sumber PAD. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah – daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor – sektor yang produktif di daerah.

Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemda meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002). Tidak efektifnya berbagai perda baru (terkait dengan retribusi dan pajak) selama tahun 2001 bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemda dalam meningkatkan mutu layanan publik. Meskipun mempunyai kewenangan untuk menarik pajak dan retribusi (*charge*), kewenangan ini perlu dipertimbangkan untung-ruginya (*cost and benefit*) misal dalam penentuan tarif layanan publik. Keengganan masyarakat untuk membayar pajak ataupun retribusi bisa jadi disebabkan kualitas layanan publik yang memprihatinkan. Akibatnya produk yang seharusnya bisa dijual justru merespon negatif (Mardiasmo, 2002).

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kedua komponen tersebut adalah PAD dan Bagian Sumbangan & Bantuan. Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB/PDRB), namun demikian indikator ini dianggap tidak selalu tepat dikarenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. Indikator lain, yaitu

pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ini (Kuncoro, 2004). Indikator ini lebih komprehensif dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dikarenakan lebih menekankan pada kemampuan negara/daerah untuk meningkatkan PDB/PDRB agar dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Indikator ini secara simultan menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan seiring dengan semakin cepatnya laju pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “HUBUNGAN ANTARA DANA ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENDAPATAN PER KAPITA (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007-2009)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Per Kapita?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Per Kapita?

5. Bagaimanakah pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan per Kapita melalui Pendapatan Asli Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap peningkatan Belanja Modal.
2. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Belanja Modal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan per Kapita.
4. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan per Kapita.
5. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan per Kapita melalui Pendapatan Asli Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Kabupaten/Kota dalam pengambilan kebijakan kedepannya bagi daerahnya. Sehingga kedepannya dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat agar daerahnya makin berkembang dan maju.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada investor bahwa otonomi yang diselenggarakan pemerintah berjalan baik di Kabupaten/Kota sehingga bisa menarik minat investor untuk berinvestasi.

3. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapita di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi dalam lima bab yang secara garis besarnya disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara garis besar tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijabarkan tentang teori-teori dan pendapat-pendapat yang berhubungan dengan masalah penelitian, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas sampel penelitian, sistem pengumpulan data penelitian, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, Model Penelitian, Pengujian

Instrumen, Pengujian Asumsi Klasik dan Pengujian Hipotesis.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang pembahasan gambaran umum penelitian, pengujian kualitas pengumpulan data, hasil pengujian asumsi serta pengujian hipotesis yang merupakan usaha untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian.